

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin maju dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang mengedepankan pemerintah daerah. Di tengah meningkatnya globalisasi di seluruh dunia, pemerintah daerah di setiap negara dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan daya saing untuk menjadi lebih mandiri serta dapat bersaing dengan baik di tingkat internasional (Juwita, 2013). Sejalan dengan reformasi keuangan negara, perubahan-perubahan menjadi krusial untuk mendukung kelancaran pelaksanaan reformasi tersebut. Salah satu transformasi yang signifikan terjadi dalam bidang akuntansi pemerintahan, di mana proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak sesuai dengan tujuan masing-masing. Terdapat beberapa faktor penentu terhadap kualitas laporan keuangan yaitu pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah yang perlu dipahami oleh setiap staf pada bagian keuangan, selain itu sumber daya manusia juga berperan penting terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi yang dapat menghasilkan kualitas laporan yang andal dan dapat dibandingkan.

Fenomena saat ini pada organisasi sektor publik di Indonesia adalah kebutuhan akan akuntabilitas dan transparansi yang lebih tinggi dalam kinerja

lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah (Rafid, 2016). Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai *good governance*. Akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai tanggung jawab untuk menyampaikan keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yaitu melalui penyusunan laporan keuangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu dokumen yang tersusun secara teratur mengenai keadaan keuangan dan aktivitas transaksional suatu entitas pelaporan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan kinerja keuangan. Informasi ini bertujuan memberikan manfaat kepada pengguna informasi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan terkait alokasi sumber daya. Selain itu, tujuan akuntansi pemerintah juga memastikan bahwa dana yang diperoleh dari masyarakat digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat (Safitri, 2020). Laporan keuangan perlu disusun menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan, termasuk bagi yang tidak memiliki latar belakang keuangan. Istilah teknis harus dijelaskan secara komprehensif dan format

laporan keuangan harus dirancang secara terstruktur dan logis. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemahaman tentang standar akuntansi pemerintah.

Standar akuntansi pemerintah dirancang untuk memberikan pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Standar akuntansi pemerintah dianggap sebagai prasyarat yang perlu dipenuhi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Mentu & Sondakh, 2016). Salah satu pemicu tercapainya kesesuaian penerapan standar akuntansi pada laporan keuangan pemerintah adalah pemahaman. Pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis suatu objek. Pemahaman yang baik dalam proses penyusunan laporan keuangan menjadi faktor kritis dalam upaya menciptakan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Safrizal et al., 2023).

Untuk memperoleh informasi berkualitas, perlu adanya sistem yang efisien dalam mengelola data sehingga dapat menghasilkan informasi bernilai. Sistem ini harus mampu memberikan informasi dengan cepat, akurat, dan tepat waktu. Pengawasan keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Pengawasan keuangan diperlukan guna memastikan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan supaya dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku (Yanti et al., 2020). Upaya meningkatkan produktivitas karyawan dapat dicapai melalui

pemanfaatan sistem informasi yang dapat diandalkan, khususnya sistem informasi akuntansi. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan informasi keuangan yang krusial dalam pengambilan keputusan strategis di perusahaan atau organisasi. Untuk memastikan kelancaran implementasi sistem yang handal, diperlukan sumber daya manusia dengan kualifikasi tinggi. Keberhasilan sistem tersebut sangat bergantung pada dukungan dan kemampuan seluruh tim yang mengelolanya.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan juga terdapat pada tingkat kecakapan sumber daya manusia yang memadai. Menurut Stephen Robbin kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan atau kapasitas individu dalam melakukan berbagai tugas yang dipengaruhi oleh faktor intelektual dan fisik (Joobstreet tim konten, 2023). Sementara itu, Badan Nasional Sertifikasi Profesi menjelaskan kompetensi sebagai kesiapan kerja individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Kompetensi mengacu pada sifat atau kualitas individu yang membantu untuk mencapai kesuksesan dalam pekerjaan (Syafira, 2022). Dengan demikian, kompetensi dapat dijelaskan sebagai kinerja yang mengarah pada pencapaian tujuan secara menyeluruh untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan daerah dapat timbul akibat kekurangan pegawai pemerintah yang memiliki kompetensi dan pendidikan yang sesuai dalam bidang akuntansi.

Menurut (Sako & Lantowa, 2018) Penerapan SAP Nomor 71 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan

keuangan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Ini bertujuan agar laporan keuangan memberikan informasi yang jelas tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan pemakai laporan keuangan sebagai alat yang berguna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Rafid, 2016) ditemukan bahwa kekurangan staf keuangan dengan latar belakang pendidikan akuntansi serta minimnya pemahaman pegawai terhadap teknologi dan akuntansi berbasis komputer menghambat pencapaian tujuan penggunaan sistem informasi akuntansi.

Pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal masalah yang serupa juga ditemukan, ini dapat menghambat peningkatan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, masih kurangnya jumlah pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi serta kebutuhan akan pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah menjadi kendala utama. Temuan ini menegaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia di lembaga pemerintah masih belum memadai. Keterbatasan sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi di organisasi pemerintah bisa berdampak negatif pada kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan.

Penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun terdapat pula penelitian yang tidak

konsisten antara penelitian satu dengan yang lain. Menurut (Sari et al., 2023) ; (Novita Yanti, 2022); (Rohmah et al., 2020) menyatakan bahwa variabel standar akuntansi pemerintah dan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah adalah pedoman yang diterapkan oleh pemerintah untuk menyusun laporan keuangan. Standar ini dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Sedangkan sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Adhitama, 2017) pada variabel sumber daya manusia terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya, hal tersebut mampu menghasilkan laporan keuangan yang baik. Kompetensi sumber daya manusia merujuk pada kemampuan yang memadai untuk menyelesaikan tugas atau memiliki keterampilan yang diperlukan baik dalam kehidupan pribadi maupun sebagai seorang profesional. Hasil yang serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Rafid, 2016); (Pavitasari & Aisyah, 2019) menyatakan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR PENENTU KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PSDA) PEMALI COMAL”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan pertimbangan dan memberikan pemahaman serta memperluas wawasan mengenai pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk menambah pengetahuan terkait faktor penentu kualitas laporan keuangan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia.

b. Bagi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Pemali Comal

Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi instansi pemerintah mengenai sumber daya manusia untuk dapat memiliki pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Hal tersebut diharapkan dapat menambah kualitas laporan keuangan yang akan disajikan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan memahami topik

mengenai faktor penentu kualitas laporan keuangan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan kompetensi sumber daya.

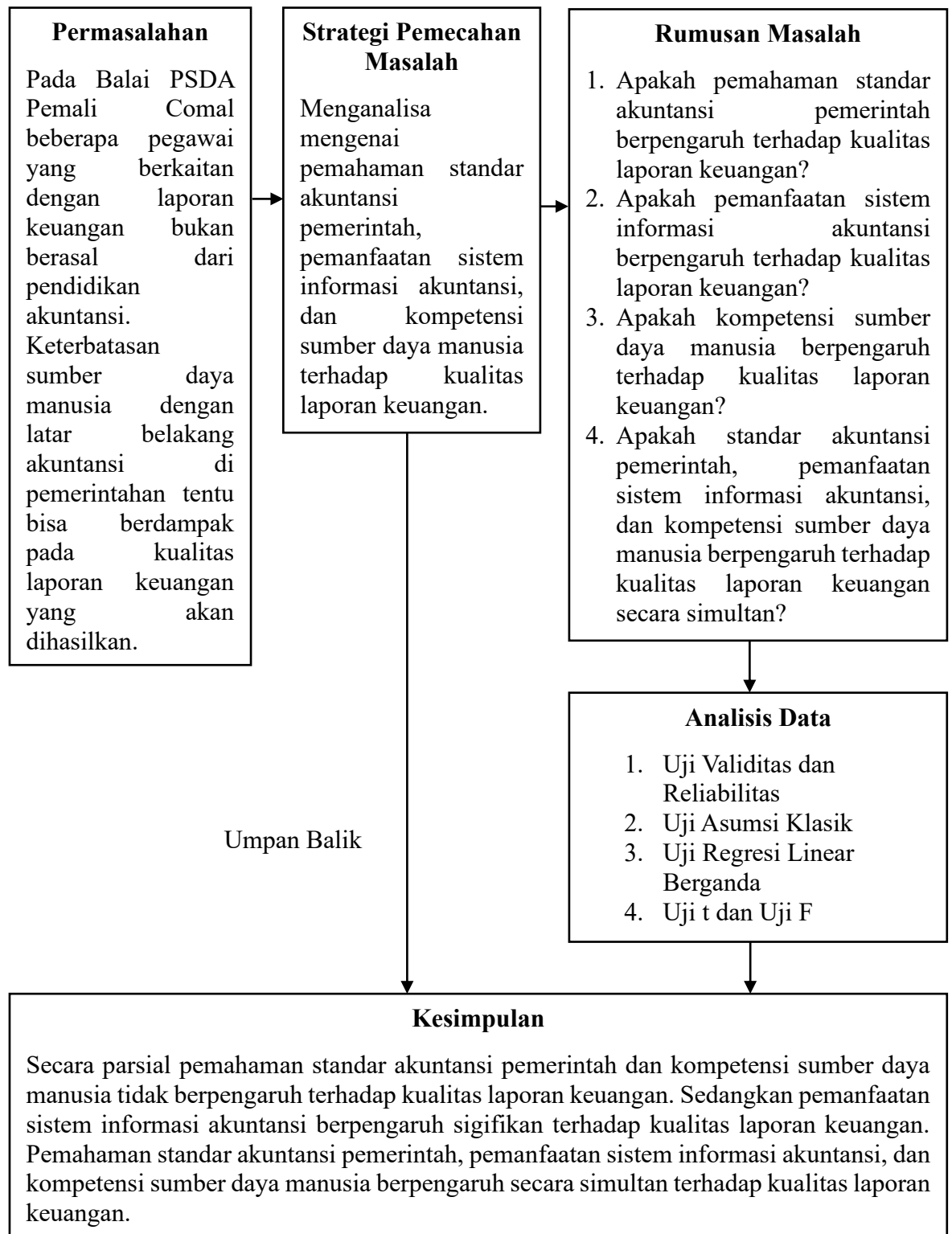
1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian bertujuan agar peneliti lebih terfokuskan pada pokok pembahasan. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan sehingga masalah-masalah dalam penelitian dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini terfokuskan pada faktor penentu kualitas laporan keuangan yaitu pemahaman standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Kerangka Berpikir

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai pengelolaan keuangan yang optimal adalah melaporkan pertanggungjawaban keuangan pemerintah secara tepat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dalam upaya penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang optimal, penting untuk memastikan bahwa proses tersebut mematuhi prinsip tepat waktu (Artana, 2016). Oleh sebab itu dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten yang memahami standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi, diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas dan andal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak pihak mengandalkan informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar untuk membuat keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus memberikan manfaat yang signifikan bagi para pemakai dan memiliki nilai yang relevan. Ketidakterediaan pengelolaan keuangan dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terbatas dalam bidang ilmu akuntansi untuk mengelola keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji sejauh mana pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Menurut uraian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan untuk membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir terdiri dari 3 bagian, dimana masing-masing bagian dan bab akan disusun secara sistematis sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca agar menemukan bagian-bagian yang ada di dalam tugas akhir ini. Pada bagian awal berisi sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tugas akhir, halaman lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar simbol, serta daftar lampiran.

2. Bagian isi yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan meliputi beberapa subbab yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan kajian pustaka, penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan dengan jelas mengenai lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis data, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, serta definisi operasional variabel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV peneliti akan memberikan hasil analisa, menjelaskan serta menyajikan data dari hasil penelitiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini sebagai penutup dalam tugas akhir dari penelitian yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dan keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang ditujukan untuk memberikan dampak yang baik bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi mengenai kepustakaan atau literature yang berkaitan dengan penelitian.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan dalam penelitian ini.